KAIBON ABHINAYA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT E-ISSN 2657-1110
http://dx.doi.org/10.30656/ka.v8i2.11229

Penguatan Lingkar Kerjasama Kolaboratif dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Desa

Ilima Fitri Azmi[1], Murtafia[2], Eljihad Akbari Syukriah Mathory[3]
[1]Prodi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Makassar
[2]Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Makassar
[3] Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Makassar
Email: ilimafitriazmi@stialanmakassar.ac.id, murtafia@stialanmakassar.ac.id, eljihad.asm@stialanmakassar.ac.id

Abstrak
Desa Biring Kassi, Kabupaten Takalar, merupakan desa hasil pemekaran yang baru terbentuk pada tahun 2022 dan hingga saat pengabdian dilaksanakan belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun koperasi, sementara sebagian besar warganya yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan desa akan lembaga ekonomi yang mampu mendorong kesejahteraan dan keterbatasan kapasitas pemerintah desa serta masyarakat dalam membentuk dan mengelola BUMDes secara mandiri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam pembentukan dan penguatan tata kelola BUMDes sebagai salah satu instrumen strategis pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat desa. Metode pelaksanaan mencakup tahapan identifikasi kebutuhan dan potensi desa, pendampingan penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan BUMDes, serta penguatan kapasitas pengurus melalui workshop dan bimbingan teknis, dengan indikator keberhasilan berupa terbentuknya kelembagaan BUMDes secara resmi, tersusunnya rencana bisnis awal, dan meningkatnya pemahaman peserta terhadap tata kelola BUMDes yang dievaluasi melalui observasi partisipatif dan diskusi terarah. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya BUMDes Pa'biring di Desa Biring Kassi beserta kepengurusannya, tersusunnya rencana bisnis awal berupa budidaya ikan nila dan ayam petelur, serta meningkatnya pemahaman aparatur desa dan masyarakat mengenai dasar hukum, struktur organisasi, dan pengelolaan keuangan BUMDes. Kegiatan ini menegaskan pentingnya model kolaborasi lintas aktor dalam mendorong kemandirian ekonomi desa yang baru terbentuk, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap agenda reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan ekstrem tingkat desa.

Kata Kunci: pengembangan BUMDes, kemiskinan, pengabdian masyarakat, tata kelola BUMDes

© Azmi et al

http://dx.doi.org/10.30656/ka.v8i2.11229

PENDAHULUAN

Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks pembangunan nasional. Desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Bahkan, perencanaan dan pelaksanaan tujuan bernegara sejatinya berawal dari tingkat desa, sebagaimana tercermin dalam cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan persentase tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6- 7%, dengan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada tahun 2024. Namun, capaian penurunan angka kemiskinan dalam 10 tahun terakhir belum memenuhi target optimal hanya dengan persentase penurunan sebesar 2%. Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan bahwa 4.982 desa berstatus desa sangat tertinggal pada tahun 2022. Lebih lanjut, berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2023, tren peningkatan jumlah desa dengan status desa berkembang tidak diimbangi dengan percepatan pembangunan desa di berbagai aspek. Hal tersebut menandakan bahwa dukungan finansial dana desa masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh elemen desa. Pada tataran teknis, dibutuhkan model kerangka advokasi pembangunan pembangunan pada level desa berbasis kolaborasi yang membutuhkan sinergi aktor internal dan eksternal desa. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa terkandung semangat kemandirian dan otonomi desa agar mampu berdikari dan berdaya saing. Dengan demikian, sesungguhnya UU No. 6 tahun 2014 sudah menyediakan seperangkat payung regulasi untuk dilakukannya upaya-upaya pemandirian desa. Sebagai salah satu contoh upaya tersebut adalah dialokasikannya dana desa oleh pemerintah pusat untuk kemajuan pembangunan desa. Namun, pada kenyataannya hasil riset menunjukkan bahwa banyak desa yang belum memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya yang ada, termasuk anggaran untuk upaya pembangunan desa (Hermawansyah, Fitri Azmi, Muhammad, & STIA LAN Makassar, 2023).

Salah satu indikasi mengapa hal ini terjadi adalah karena desa memiliki keterbatasan dan dalam pengelolaan desa yang mana pemerintah desa bekerja sepenuhnya sendiri tanpa mendapat pendampingan dari pihak manapun, sehingga pengelolaannya terkesan kurang terarah dalam program pembangunannya. Sebagai bentuk tanggung jawab civitas akademika yang terikat dengan janji tri dharma perguruan tinggi, kami merasa perlu ikut terlibat dalam upaya pemberdayaan desa. Salah satu opsi dari langkah- langkah pemberdayaan desa adalah melalui upaya pendampingan dan pemberdayaan untuk mengoptimalisasi potensi dan sumber daya di desa dalam rangka mengentaskan kemiskinan desa. Setelah masyarakat dinilai memiliki kapasitas yang memadai dalam pengembangan potensi dan sumber daya desa, maka kolaborasi dengan pihak pihak yang dapat mendorong kemajuan desa perlu dilakukan.

Dengan mengusung salah satu fokus reformasi birokrasi tematik yaitu pengentasan kemiskinan, kegiatan pengabdian ini berupaya mendorong praktik baik SDGs Desa melalui pendampingan desa. Terobosan inovatif pengabdian berdampak ini fokus pada upaya pendampingan desa khususnya desa miskin esktrim melalui kolaborasi pendampingan BUMDes. Pengabdian berdampak ini diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi Indonesia 2045 dan agenda RB Tematik pengentasan kemiskinan tingkat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh perangkat desa dan dimiliki oleh desa secara

© Azmi et al

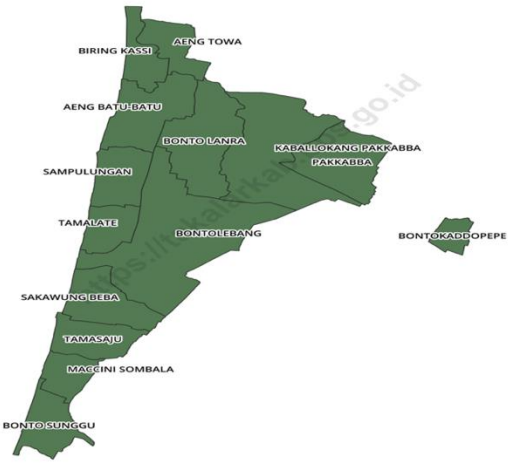
http://dx.doi.org/10.30656/ka.v8i2.11229

keseluruhan atau sebagian. BUMDes dapat menerima modal langsung dari Dana Desa atau dari kekayaan dan potensi yang dimiliki Desa. BUMDes didirikan dan diprakarsakan oleh masyarakat dan perangkat desa. BUMDes dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan potensi desa. BUMDes membantu masyarakat desa menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut UU Desa, BUMDes tidak hanya memiliki tugas untuk meningkatkan sektor ekonomi tetapi juga memanfaatkan hasilnya untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan bantuan kepada orang miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, diperlukan adanya keaktifan pemerintah desanya untuk mendorong masyarakatnya untuk berkarya dan berwirausaha, salah satunya melalui sektor ekonomi kreatif dan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat (Adinugraha, Ali, Aji, & Riyanto, 2025; Cahyono, Listyorini, Huda, & Abidin, 2023; Heryani, Hakim, & Saputra, 2024; Rahmawati, Fadilah, Pramesti, Firmansyah, & Az Zahra, 2024; Talani & Tuli, 2023). Dengan demikian dapat dilihat posisi BUMDes yang sangat krusial terhadap pengembangan ekonomi desa sehingga tim pengabdian masyarakat ini menitikberatkan pada pendampingan BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan pemerintah desa, warga desa Biring Kassi yang mayoritasnya bekerja sebagai nelayan dan pedagang, masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat pendidikan masih rendah dan kesejahteraan warga masih kurang. Data menunjukkan bahwa terdapat 7.75 persen penduduk miskin di Kabupaten Takalar. Persentasi kemiskinan Kabupaten Takalar tersebut lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain di wilayah Sulawesi Selatan seperti Luwu Timur, Makassar, Pare Pare, Bulukumba, Soppeng, Wajo dan Sidrap. Angka penduduk sangat miskin di Takalar mencapai 7.782 keluarga dan 35.847 individu (Makmur, 2024).

Kesenjangan tersebut tampak nyata di Desa Biring Kassi, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Desa pemekaran dari Desa Aeng Batu Batu yang baru berdiri pada tahun 2022. Sebagian besar warganya bekerja sebagai nelayan dan pedagang dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang masih rendah, persentase penduduk miskin Kabupaten Takalar tercatat lebih tinggi dibandingkan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2024)



Gambar 1. Peta Kecamatan Galesong Utara

Desa Biring Kassi adalah desa pemekaran baru yang baru terbentuk pada tahun 2022. Des a ini merupakan pemekaran dari desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara. Karena usia desa ini masih sangat muda, Pemerintah Desa Biring Kassi pada dasarnya masih sangat membutuhkan pendampingan dan pengarahan terkait tata kelola pemerintahan desa karena pengalaman dan pemahaman terhadap manajemen pemerintahan dan Pembangunan desa masih belum terbangun secara optimal. Setelah tim melakukan pendalaman dan analisis pada lokus pengabdian masyarakat, maka didapati kendala sebagai berikut:

a. Belum adanya BUMDes yang berdiri dan berkembang untuk mensejahterakan

http://dx.doi.org/10.30656/ka.v8i2.11229

masyarakat desa

b. Pemerintah desa, aparatur desa, serta masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk mengembangkan dan mengelola BUMDes
c. Masih minimnya opsi jenis usaha yang masyarakat dan pemerintah desa pertimbangkan untuk dikembangkan pada BUMDes
d. Belum memadainya pemahaman dan kapasitas Pemerintah desa, aparatur desa dan masyarakat dalam berkolaborasi dengan stakeholder untuk mengembangkan perekonomian desa melalui BUMDes

Berdasarkan kendala yang telah berhasil diidentifikasi, maka tim PKM memformulasikan perencanaan kegiatan untuk memberikan pendampingan pembentukan dan manajemen BUMDes bagi desa, mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan budaya melalui pemberdayaan pada BUMDes, memberikan pengembangan kapasitas kepada pengurus BUMDes, melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan peran BUMDes dalam rangka pengentasan kemiskinan desa dan mendorong desa untuk menjalin kolaborasi dengan pihak pihak eksternal untuk memperkuat kinerja BUMDes. Sehingga, kegiatan PKM dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan desa dalam pembentukan BUMDes, sehingga dapat mempercepat proses pendirian dan pengelolaan unit usaha desa yang berkelanjutan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mendorong peningkatan perekonomian warga masyarakat desa. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengurus BUMDes dalam tata kelola BUMDes, menumbuhkan kontribusi nyata dari perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berdampak, sesuai dengan semangat Tridharma perguruan tinggi, mengoptimalkan peran strategis BUMDes untuk menghadirkan kegiatan ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan, memfasilitasi terbangunnya jejaring kerja sama antara desa dan mitra eksternal guna memperkuat sumber daya dan inovasi dalam pengembangan BUMDes.

METODE PELAKSANAAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat, pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa Biring Kassi, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Adapun target dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu pendampingan pembentukan BUMDes dan pengembangan kapasitas pengelola/ pengurus BUMDes pada Desa Biring Kassi, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan:

a. Tahapan Identifikasi:

   mengidentifikasi desa yang akan dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan menentukan jenis kegiatan apa yang akan dilakukan dalam program pengabdian kepada masyarakat. Dalam tahapan ini, yang dilakukan adalah kegiatan brainstorming, pencarian referensi dan literatur terkait tentang desa, dan penjajakan (mengadakan kunjungan ke desa calon lokus pengabdian kepada masyarakat).
b. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat: pada tahapan ini dilaksanakan komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah desa terkait sekaligus membahas tentang bagaimana program yang akan dilaksanakan, sejauh mana dampak yang diharapkan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Setelah dilakukan kesepakatan dengan

© Azmi et al

http://dx.doi.org/10.30656/ka.v8i2.11229

pemerintah desa terkait, tim pengabdian masyarakat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan pengabdian.

c. Tahapan Evaluasi dan Pelaporan: tahapan ini merupakan tahapan penyusunan laporan pengabdian masyarakat sekaligus evaluasi kegiatan.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur melalui empat indikator utama, yaitu:

a. Terbentuknya kelembagaan BUMDes secara resmi melalui musyawarah desa beserta kepengurusannya;
b. Tersusunnya Peraturan Desa tentang BUMDes sebagai dasar hukum kelembagaan;
c. Tersusunnya rencana bisnis (business plan) awal yang sesuai dengan potensi desa;
d. Meningkatnya pemahaman aparatur desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat terhadap dasar hukum, struktur organisasi, proses bisnis, serta pengelolaan keuangan BUMDes setelah mengikuti rangkaian pendampingan dan bimbingan teknis.

Teknik Evaluasi dan Pengukuran Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Evaluasi ketercapaian kegiatan dilakukan melalui kombinasi teknik observasi partisipatif selama kunjungan lapangan dan pelaksanaan bimbingan teknis, wawancara dengan aparatur desa dan pengurus BUMDes, serta dokumentasi setiap tahapan kegiatan. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pengurus BUMDes diukur melalui perbandingan pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti workshop/bimbingan teknis (pre-test dan post-test sederhana dalam bentuk tanya jawab terstruktur) pada aspek pengetahuan (kognitif) mengenai dasar hukum dan tata kelola BUMDes, sikap dan motivasi (afektif) untuk mengelola BUMDes secara berkelanjutan, serta keterampilan praktis (psikomotorik) dalam menyusun dokumen kelembagaan dan rencana bisnis, dengan merujuk pada pendekatan evaluasi pelatihan pengelolaan BUMDes yang telah digunakan pada kegiatan pengabdian sejenis (Ginting, Ginting, & Afifah, 2024). Pendekatan ini dipilih agar capaian peningkatan kapasitas dapat diukur secara lebih terstruktur dan hasil pendampingan berpotensi direplikasi pada desa lain dengan karakteristik serupa.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Biring Kassi, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu bulan April hingga Juli 2025, melibatkan dosen Politeknik STIA LAN Makassar sebagai narasumber pelatihan dan panitia kegiatan, serta mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara. Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya dan terselenggaranya BUMDes dengan tata kelola dan proses bisnis yang baik dan memada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan kegiatan yang pertama adalah singkronisasi pemahaman dan koordinasi internal tim untuk merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rapat perdana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting pada tanggal 17 April 2025.

Dari seluruh rangkaian kegiatan, rapat tidak hanya dilaksanakan sekali tapi beberapa kali, terutama rapat rapat informal internal tim yang membahas mekanisme kunjungan lapangan, dll. Dalam rapat selanjutnya, disepakati lokus yang akan dipilih adalah desa Biring Kassi, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Pemilihan lokus ini didasarkan pada realita bahwa desa ini adalah desa yang baru terbentuk (desa pemekaran) pada tahun 2022. Masih banyak hal yang harus dilakukan oleh desa ini dalam pembangunannya untuk menyelesaikan isu isu desa. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi awal dengan pemerintah desa, warga masyarakat di desa ini terbilang masih banyak yang berada di bawah angka kemiskinan. Tingkat pendidikan rendah

© Azmi et al

dan masih sedikit warga yang Sejahtera. Berdasarkan hasil IDM (Indeks Desa Membangun), Desa Biring Kassi pada tahun 2022 masuk dalam kategori desa Tertinggal. Pada tahun 2023, desa tersebut mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori desa Berkembang. Di tahun 2024, desa ini masuk dalam kategori desa Maju. Namun demikian, catatan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan rekomendasi perlunya pembentukan BUMDes karena desa ini belum memiliki BUMDes maupun koperasi sama sekali. Untuk menindaklanjuti hasil rapat ini, tim pengabdian turun lapang ke desa untuk membahas dan mengajukan rencana pendampingan BUMDes ini pada tanggal 15 Mei 2025. Pembahasan di kantor desa Biring Kassi mencakup kondisi desa, rencana desa terkait BUMDes, dan pengajuan pendampingan desa dalam perencanaan, pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, tim pengabdian disambut oleh Bapak Rizal, Sekretaris Desa. Penyampaian dari Pemerintah Desa adalah desa menyambut dengan siap dan antusias terkait program pendampingan ini karena memang sebenarnya desa sudah lama ingin membentuk BUMDes namun masih terkendala di beberapa hal seperti perlunya mencari/ menunjuk pengurus yang kompetensinya memadai untuk melakukan usaha, mengidentifikasi jenis jenis usaha yang akan dilakukan BUMDes. Sekretaris Desa Biring Kassi juga menyatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah di desa belum ada sumber daya yang benar benar memahami tata kelola BUMDes, mulai dari dasar hukum dan peraturan peraturan mendasar yang harus dipenuhi, kriteria penunjukan pengurus BUMDes, Penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes, serta pengaturan/ manajemen bisnis dan keuangan BUMDes. Adapun jenis usaha yang akan diintensifkan dalam BUMDes antara lain budidaya ikan nila dan ayam petelur. Di tahap awal, budidaya ikan nila akan dimulai terlebih dahulu dan apabila sudah berjalan dan membuahkan hasil yang optimal maka dapat dilengkapi dengan budidaya ayam petelur. Pemerintah desa akan mempersiapkan anggaran yang akan dicairkan dalam beberapa termin untuk memulai usaha budidaya ikan nila. Budidaya ikan nila dipilih karena ikan nila mudah untuk dipasarkan, baik dipasarkan dalam bentuk ikan mentah atau yang sudah dimasak di rumah makan. Banyak usaha kuliner ikan bakar yang dijalankan oleh warga sehingga rencana ikan nila akan disalurkan disana.

Dalam kunjungan ini pula tim diajak melihat tambak budidaya ikan nila yang sudah dibuat oleh Pemerintah Desa sebagai percontohan dan percobaan awal. Hasil dari kunjungan ini adalah dirumuskan beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk menginisiasi BUMDes di Desa Biring Kassi antara lain:

1. Pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes
2. Pendampingan pembentukan BUMDes
3. Kegiatan workshop/ bimbingan teknis pengelolaan BUMDes
4. Pendampingan perumusan proses bisnis BUMDes

Dari kegiatan kunjungan lapangan ini, ketua tim PKM berkomunikasi lebih lanjut dengan kepala desa baik melalui telepon/ pesan singkat dan bertemu langsung untuk berkonsultasi terkait kegiatan PKM dan rencana pembentukan BUMDes. Setelah berkoordinasi, akhirnya desa membentuk BUMDes dengan nama BUMDes Pa'biring pada bulan Juli 2025 bersamaan dengan dilaksanakan Musyawarah Desa terkait Ketahanan Pangan yang mana dalam kegiatan ini dikukuhkan pula pengurus BUMDes dan manajemen BUMDes. Dalam pembentukan BUMDes ini, Pemerintah desa tetap aktif berkomunikasi dengan tim PKM. Menurut arahan dari Kepala Desa Biring Kassi, setelah pendampingan pembentukan BUMDes selesai dan BUMDes sudah siap untuk berjalan, kegiatan yang paling prioritas untuk dilakukan

© Azmi et al

http://dx.doi.org/10.30656/ka.v8i2.11229

adalah kegiatan workshop/ bimbingan teknis pengelolaan BUMDes sehingga ditetapkan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan BUMDes dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 menyesuaikan dengan jadwal dari Pemerintah Desa. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengurus BUMDes, BPD, Kepala Desa dan jajarannya, pendamping desa dan masyarakat. Materi yang diberikan adalah tentang Tata Kelola BUMDes, Proses Bisnis BUMDes, dan Keuangan BUMDes dengan menghadirkan narasumber dari Politeknik STIA LAN Makassar yang kompeten di bidangnya dan berpengalaman melakukan pendampingan BUMDes di berbagai daerah di Sulawesi Selatan.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan





Rangkaian kegiatan berjalan selama satu hari kerja dengan panitia dari tim PKM dan dibantu oleh Pemerintah Desa Biring Kassi. Dalam pelaksanaan, peserta sangat antusias dan banyak bertanya tentang seluk beluk penyelenggaraan dan proses bisnis BUMDes. Dalam kegiatan ini masyarakat dan pengurus BUMDes dibantu untuk memformulasikan proses bisnis dan rencana kerja BUMDes.

Analisis Hasil dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola BUMDes

Rangkaian tahapan yang ditempuh dimulai dari identifikasi masalah, pendampingan penyusunan regulasi, hingga penguatan kapasitas pengurus—sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat dan pemerintah desa sebagai subjek aktif dalam proses perubahan, bukan sekadar penerima program (Mardikanto & Soebiato, 2012). Terbentuknya BUMDes Pa'biring beserta kepengurusan dan rencana bisnis awal menunjukkan bahwa pendampingan kolaboratif antara perguruan tinggi dan pemerintah desa mampu mempercepat proses kelembagaan yang sebelumnya terkendala oleh keterbatasan pengetahuan aparatur dan masyarakat, sebagaimana juga ditemukan pada pendampingan BUMDes di desa lain yang menghadapi persoalan serupa berupa rendahnya

© Azmi et al

http://dx.doi.org/10.30656/ka.v8i2.11229

penguatan kelembagaan dan literasi tata kelola (Ginting, Ginting, & Afifah, 2024).

Dari sisi tata kelola, penekanan materi bimbingan teknis pada dasar hukum, struktur organisasi, proses bisnis, dan manajemen keuangan BUMDes Pa'biring merefleksikan aspek-aspek tata kelola yang secara konsisten diidentifikasi sebagai penentu keberhasilan BUMDes dalam kajian-kajian sejenis, yaitu mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan partisipasi masyarakat (Abdurrahman, Pariono, Akuba, Lamagoa, & Ngau, 2025). Pemilihan budidaya ikan nila dan ayam petelur sebagai unit usaha rintisan juga sejalan dengan prinsip bahwa keberlanjutan BUMDes sangat bergantung pada kesesuaian jenis usaha dengan potensi lokal dan kesiapan pasar, bukan semata pada aspek legal-formal pembentukannya. Dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem, temuan ini memperkuat argumen bahwa intervensi berbasis konvergensi dan kolaborasi lintas aktor di tingkat desa lebih efektif dibandingkan pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri (Dian Astuti, 2024), karena keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra pendamping mampu mengisi kesenjangan kapasitas yang tidak dapat dipenuhi pemerintah desa secara mandiri.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian Masyarakat mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Indonesian Association of Public Administration (IAPA) yang telah menyelenggarakan Hibah PKM dan memilih tim ini sebagai pemenang serta mendanai secara penuh seluruh proses pelaksanaan kegiatan PKM dari awal hingga akhir. Terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Administrasi Negara dan Politeknik STIA LAN Makassar yang memberikan kesempatan dan mendukung kegiatan PKM ini. Tak lupa tim PKM juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Desa Biring Kassi Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang telah bersedia bekerja sama dalam kegiatan ini dengan komitmen dan motivasi yang sangat kuat untuk mengembangkan dan menggerakkan perekonomian desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Biring Kassi Kabupaten Takalar dapat disimpulkan bahwa desa tersebut belum memiliki badan usaha yang dapat mensejahterakan dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya, sehingga pengabdian yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Politeknik berfokus pada pendampingan BUMDes yang pada akhirnya diharapkan BUMDes Pa'biring Desa Biring Kassi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dapat mulai beroperasi dan bekerja pada pertengahan tahun 2025 ini.

Saran

Masih panjang perjalanan BUMDes Pa'biring dalam upayanya untuk menanggulangi kemiskinan di desa Biring Kassi. Untuk itu, semangat dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah desa, dan masyarakat. Proses pembelajaran dan pembinaan berkelanjutan dalam pengelolaan BUMDes sangat perlu untuk dilakukan. Kedepannya diharapkan Politeknik STIA LAN masih dapat memberikan pendampingan dan memantau jalannya proses bisnis BUMDes sembari dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran, gagasan dan upaya untuk memajukan BUMDes Pa'biring di kemudian hari.

© Azmi et al

DAFTAR REFERENSI

Adinugraha, H. H., Ali, J., Aji, A. N., & Riyanto, A. A. (2025). Pendampingan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Desa Bodas Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Masyarakat. *Bakti : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(1), 30–40. https://doi.org/10.51135/BAKTI.5.1.20-29

Cahyono, E. A., Listyorini, I., Huda, N., & Abidin, M. Z. (2023). Pendampingan Komunitas Balai Ternak "Jadid Farm" Berbasis Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Desa Setiaji Sukosewu Bojonegoro. *I-Com: Indonesian Community Journal*, *3*(4), 1893–1902. https://doi.org/10.33379/ICOM.V3I4.3337

Dian Astuti. (2024). Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Konvergensi dan Inovasi Program. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(3), 355–363. https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i3.4123

Ginting, S., Ginting, W. O., & Afifah, N. (2024). Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buluhnaman Kecamatan Munte Kabupaten Karo. Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(2), 204–215. https://doi.org/10.24036/abdi.v6i2.680

Hermawansyah, A., Fitri Azmi, I., Muhammad, A., & STIA LAN Makassar, P. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Good Governance*, 101–116. https://doi.org/10.32834/GG.V19I2.624

Heryani, H., Hakim, A. R., & Saputra, P. P. R. (2024). Pendampingan dari Diagnosis Implementasi Green House Level Medium Sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan Ekstrim. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, *3*(3), 555–563. https://doi.org/10.20527/ILUNG.V3I3.11239

Makmur. (2024). Update Jumlah Penduduk Sangat Miskin Takalar Sulsel, 7.782 Keluarga dan 35.847 Individu. Retrieved June 29, 2025, from https://makassar.tribunnews.com/2024/06/29/update-jumlah-penduduk-sangat-miskin-takalar-sulsel-7782-keluarga-dan-35847-individu?page=2

Mardikanto, T. (2017). Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Gava Media.

Rahmawati, P., Fadilah, N., Pramesti, D. O., Firmansyah, Moch. R., & Az Zahra, N. (2024). Pemberdayaan UMKM Desa Nguling Melalui Pelatihan Konten Media Kreatif. Islamic Management and Empowerment Journal, 6(2), 195–214. https://doi.org/10.18326/IMEJ.V6I2.195-214

Talani, N. S., & Tuli, M. (2023). Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Desa Pesisir Melalui Pelatihan Pembuatan Cinderamata. SULUH: Jurnal Abdimas, 5(1), 132–141. https://doi.org/10.35814/SULUH.V5I1.4348

Takalar Tahun 2024. Takalar: BPS Kabupaten Takalar.